

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan kumpulan negara-negara dari 10 Negara dikawasan Asia Tenggara, Organisasi Internasional ini dideklarasikan tepat pada tanggal 8 Agustus Tahun 1967 di Bangkok, Thailand melalui penandatanganan yang disebut Deklarasi Bangkok "*Bangkok Declaration*". Kesepakatan ditandatangani oleh 5 (lima) Menteri dari lima Negara, perwakilan dari Indonesia adalah Adam Malik, Filipina oleh Narciso R. Ramos, Thailand oleh Thanat, Malaysia oleh Tun Abdul Razak, dan Singapura oleh S. Rajaratnam, Kelima Negara tersebut disebut sebagai founding father atas berdirinya organisasi ASEAN (ASEAN Secretariat, 2015).

Negara-Negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai beberapa kesepakatan bersama, salah satunya adalah dalam bidang perekonomian yang dewasa ini dikenal dengan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), kesepakatan perekonomian tersebut adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Negara anggota ASEAN, hingga umur berdirinya ASEAN telah mencapai lebih dari setengah abad harusnya sudah sangat produktif dan matang dalam mencapai tujuan-tujuan mensejahterakan rakyat Negara yang tergabung dalam ASEAN, namun hingga saat ini terdapat permasalahan besar yang selalu membayangi Negara-negara ASEAN khususnya Negara yang termasuk dalam kelompok

menengah seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina dan Brunei Darussalam yaitu permasalahan yang berkaitan dengan “Kemiskinan”.

Kemiskinan merupakan isu sentral bagi negara di dunia, terutama bagi negara berkembang. Dimensi kemiskinan yang sangat luas, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa semua kalangan akan menghadapi masalah kemiskinan tersebut. Usaha dan upaya dalam mengurangi atau meminimalisir angka kemiskina harus dilakukan secara menyeluruh serta mencakup hampir semua bagian kehidupan masyarakat secara terpadu, sehingga kemiskinan yang merupakan masalah besar dalam ekonomi hanya dapat dikurangi (Tonapa dkk, 2015).

Berbagai konsep maupun pemikiran tentang kemiskinan telah dikaji dan diterapkan oleh berbagai negara berkembang namun belum membuahkan hasil yang baik. Kemiskinan dapat dikatakan dimana ada manusia disitu ada kemiskinan, dan hampir setiap negara pernah bahkan sedang mengalami kondisi kemiskinan itu, namun setiap negara tentunya mempunyai solusi dan cara yang berbeda untuk mengatasinya. Kemudian dari kemiskinan ini pastinya timbul berbagai macam masalah sosial yang kompleks, seperti dapat dilihat disepanjang jalanan kota maupun desa semakin banyak gepeng di pinggir jalan, PSK semakin bertambah, kemudian juga semakin banyak anak jalanan yang terjaring oleh razia, dan dapat dipastikan 90% faktor utama yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah kondisi ekonomi yang berkategori rendah, dan banyaknya peningkatan jumlah anak putus sekolah yang disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan sekolah

yang setiap tahun jumlahnya semakin meningkat yang dapat digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal tersebut semakin memperjelas bahwa kemiskinan benar-benar ada disetiap Negara (Suliswanto, 2010).

Kemiskinan selalu terjadi dimanapun baik negara maju maupun negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam sebagai negara berkembang. Menurut laporan ASEAN Secretariat (2015) tepat tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 11.3%, pada tahun yang sama jumlah penduduk miskin di Malaysia adalah 1.37% untuk Filipina sebesar 24,1%, dan Thailand diangka 9,2%.

Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan pada ukuran pendapatan masyarakat, antara lain kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut (*absolute poverty*) dimaksudkan sebagai kemiskinan dapat dilihat menggunakan ukuran yang pasti (absolut) yang berlaku di dunia dan ditahun yang berbeda. Hal tersebut dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu apa yang dapat dikenal garis kemiskinan (*poverty line*). Sedangkan kemiskinan relatif (*relative poverty*) merupakan kemiskinan yang terjadi karena adanya perbandingan antara satu kelompok pendapatan dengan pendapatan kelompok lain, atau dapat dikatakan bahwa kita melihat kemiskinan itu dalam konteks sosial atau lingkungannya. Penentuan garis kemiskinan yang digunakan terkadang bersifat politis, jika garis kemiskinan yang telah disepakati terlalu rendah, maka dapat dipastikan jumlah orang miskin menjadi amat kecil. Sebaliknya jika garis kemiskinan yang disepakati

terlalu tinggi maka akan mengakibatkan jumlah orang yang tergolong miskin menjadi amat tinggi. Karena penentuan garis kemiskinan dapat dibuat tinggi ataupun rendah, maka angka dan garis kemiskinan seringkali bersifat politis, tergantung pada selera penguasa (Hudiyanto, 2017).

Berdasarkan pola waktu, kemiskinan dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu (1) *persistent poverty*, adalah kemiskinan yang telah kronis atau sifatnya turun temurun; (2) *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (3) *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan yang sering dijumpai pada nelayan dan sektor pertanian; dan (4) *accident poverty*, merupakan kemiskinan yang terjadi karena adanya kejadian bencana alam, kekerasan, konflik ataupun adanya dampak dari suatu kebijakan tertentu yang mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan pada masyarakat (Sastraamadja, 2003).

Adapun kandungan dalam ayat Al-Qur'an tentang kemiskinan, yaitu dalam surat Ar-Rum ayat 38:

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ
 اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung” (Qs. Ar-Rum ayat 38).

Ayat ini menjelaskan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak dalam kekayaan itu. Apabila seseorang mempunyai hak, maka hak tersebut dapat dituntut untuk dirinya sendiri. Apabila hak yang diberikan Allah, maka

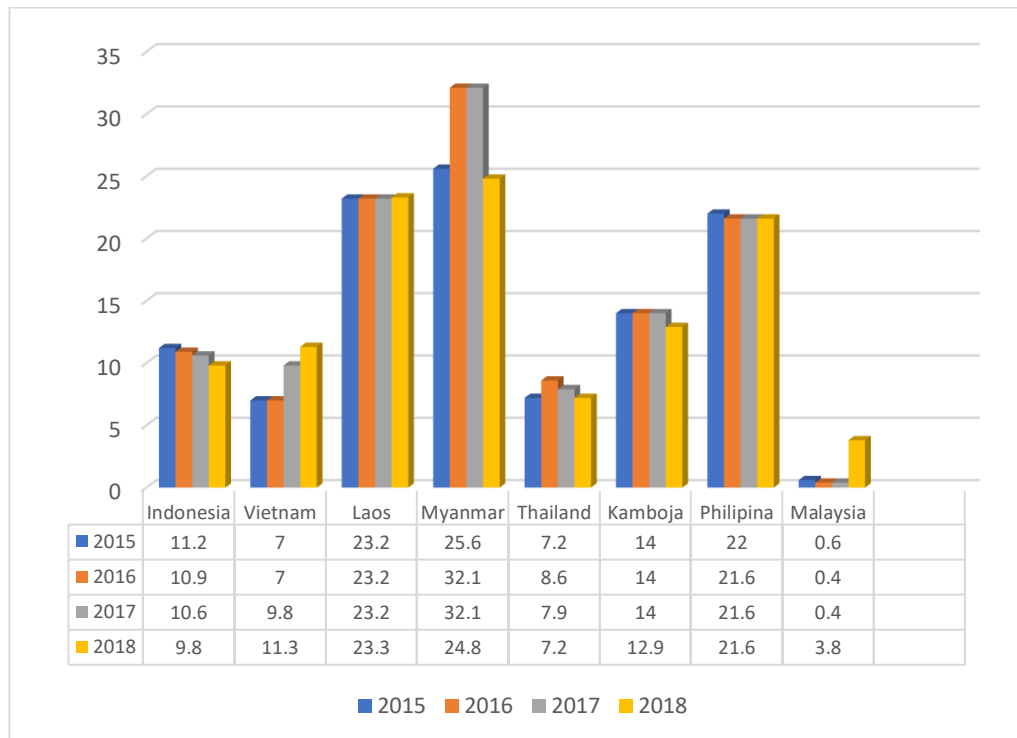
bantuan atau sedekah tidak hanya berarti sebagai suka rela, melainkan memang memberikan hak kepada orang lain yang memang mempunyai hak. Kemiskinan adalah penyakit masyarakat yang harus dihilangkan. Ada orang yang harus dihilangkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi SAW, bersabda “Orang miskin bukanlah orang yang suka berkeliling kepada manusia dan dapat disuruh pulang setelah diberi satu atau dua suap, sebiji atau dua biji kurma”.

Kemiskinan tidak hanya melibatkan negara-negara dunia ketiga, melainkan juga sudah dialami negara-negara berkembang. Hal ini karena disamping kemiskinan berkaitan dengan orang yang tidak mampu membiayai kehidupannya secara layak (kemiskinan absolut) dan berkaitan juga dengan perbandingan yang timpang antara penduduk berpenghasilan paling tinggi dengan penghasilan paling rendah (Hudiyanto, 2015). Masalah kemiskinan dinegara berkembang tidak lagi hanya sekedar bentuk ketidakmampuan dari pendapatan, akan tetapi sudah meluas sampai pada ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2005). Perkembangan bidang birokrasi suatu negara yang kompleks dapat ditengarai menjadi salah satu penyebab penghambat dari pembangunan ekonomi, serta penegakan hukum yang masih lemah menjadi salah satu hambatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sehingga paa akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas pengentasan kemiskinan (Pratama, 2014).

Menurut *World Bank* (2019), setidaknya ada 10% dari total jumlah penduduk di dunia masih mengalami kemiskinan yang akut pada tahun 2015.

Dari besarnya 10% tersebut dikatakan bahwa 5% diantaranya hanya jumlah di 5 negara saja, yaitu Bangladesh, Ethiopia, India, Nigeria dan Kongo. Namun kemiskinan sebesar 10% tersebut dikatakan sudah mengalami penurunan dari angka kemiskinan pada tahun 2013 meskipun penurunannya dinilai cenderung lambat. Oleh karena itu, adanya peningkatan dalam bidang investasi dinilai dapat mendukung dalam mengentaskan kemiskinan, penurunan konflik antarnegara, hingga peranan gejolak politik harus diperhatikan oleh setiap negara. Indonesia sendiri menyumbang sebesar 35.9 juta jiwa yang tergolong pada angka kemiskinan dimulai pada tahun 2015. Hal ini dikatakan hal positif karena dari jumlah 258 juta jiwa hanya 10.9% masyarakat yang hidup kurang dari 1.9 USD per hari.

Negara-negara anggota ASEAN yang termasuk dalam negara berkembang antara lain Indonesia, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand. Masalah kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang dapat disebabkan akibat tingkat kesenjangan yang tinggi dan sulit untuk diselesaikan.



Sumber: Asean Statistic Yearbook, 2014-2018 (%)

Gambar 1. 1 Kemiskinan Negara ASEAN Tahun 2014-2018

Dari Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa kemiskinan dengan persentase tertinggi ada di Negara Myanmar, yaitu besarnya persentase penduduk miskin sebesar 37,2% pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 persentase penduduk miskin Myanmar masih berada di posisi tertinggi yaitu 25.6%, kemudian pada tahun 2016 dan 2017 persentase penduduk miskin menjadi jumlah tertinggi diantara negara-negara ASEAN lainnya yaitu masing-masing sebesar 32,1%. Jadi, Negara Myanmar adalah negara yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi diantara negara-negara anggota ASEAN lainnya. Dari data di atas juga dapat dilihat bahwa kemiskinan yang terjadi di Malaysia tergolong rendah karena bahkan kecil, hal ini dapat disebabkan oleh besarnya GDP (*Gross Domestic Product*) negara tersebut sehingga dapat

mengakibatkan tingkat kemiskinan jumlahnya kecil dan tentunya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan persentase kemiskina di Malyasia tergolong rendah.

Wilayah Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara, semua negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara tergabung dalam organisasi disebut ASEAN. Sebagian besar perekonomian negara-negara di Asia Tenggara masih digolongkan sebagai negara berkembang, kecuali Singapura yang digolongkan sebagai negara maju, karena ekonomi kawasan Asia Tenggara masih banyak mengandalkan hasil alam, maka dengan terbentuknya kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara oleh negara-negara ASEAN sangat diharapkan agar mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di kawasan ini sehingga dapat membantu mengurangi permasalahan kemiskinan yang ada di Negara-Negara di kawasan ASEAN.

Untuk memahami berbagai permasalahan mengenai kemiskinan yang ada di Negara-Negara di kawasan ASEAN ini, fokus pemecahan masalah tidak hanya bagaimana mengatasi tentang situasi dan keadaan ekonomi dan kesejahteraan saja, melainkan perlu diperhatikan bagaimana kondisi secara geografis serta keadaan di masing-masing Negara. Karena tujuan utama dari kebijakan pembangunan ekonomi di banyak negara ialah dengan mengurangi tingkat kemiskinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh GDP (*Gross Domestic Product*) terhadap Kemiskinan di ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam) pada tahun 2004-2018?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk (*population growth*) terhadap Kemiskinan di ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam) pada tahun 2004-2018?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap Kemiskinan di ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam) pada tahun 2004-2018?
4. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap Kemiskinan di ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam) pada tahun 2004-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh GDP (*Gross Domestic Product*) terhadap Kemiskinan di ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam) pada tahun 2004-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penduduk (*Population Growth*) terhadap Kemiskinan di ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam) pada tahun 2004-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam) pada tahun 2004-2018.

4. Untuk mengetahui pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam) pada tahun 2004-2018.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam berpikir terkait dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Kemiskinan di wilayah Asia Tenggara khususnya negara-negara anggota ASEAN.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan perekonomian supaya dapat mewujudkan tujuan dari berdirinya ASEAN serta kehadiran MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) tidak lain untuk memperbaiki serta menjaga kestabilan perekonomian antar negara sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
- b. Dapat dijadikan bahan referensi atau pertimbangan dalam penyusunan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kemiskinan khususnya di negara-negara ASEAN.